Arsip Bacaan Gratis

Bebas seperti udara! Siapapun boleh membaca, menyebarluaskan, dan memanfaatkan semua bacaan di blog ini untuk tujuan apapun.

Senin, 12 Januari 2026

Apakah Tiongkok Adalah Kekuatan Imperialis Baru di Afrika? Akankah Tiongkok Menggantikan Inggris Sebagai Kekuatan Imperialis di Afrika Selatan?

Ditulis oleh: Lucien van der Walt & Michael Schmidt

Kaum revolusioner di Afrika *Anglophone* selalu melihat Inggris dan Prancis sebagai kekuatan imperialis dominan di benua ini, tetapi kekuatan lain kini mulai muncul dari bayang-bayang untuk menantang dominasi pascakolonial mereka, dan itu bukan hanya Amerika Serikat.

Kaum anarko-komunis Afrika Selatan biasanya melihat bekas koloni Inggris di Afrika Selatan sebagai kekuatan sub-imperialis, yang bertindak atas nama imperialis besar serta kelas penguasa kapitalisnya sendiri di kawasan tersebut, semacam polisi regional: jika kepentingan Inggris di Swaziland terancam oleh gerakan demokrasi, kita yakin kekuatan militer Afrika Selatan akan turun tangan untuk menopang para elit negara tersebut (seperti yang terjadi terhadap Lesotho pada 1998).

Namun, lanskap internasional sedang berubah dan kini kita dapat melihat bangkitnya Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu kingmaker paling berpengaruh di Afrika, baik dalam mendukung rezim genosida di Khartoum, maupun dengan memulai proyek pembangunan besar seperti bandara baru di Luanda (sebagai imbalan 10.000 barel minyak mentah per hari) dan stadion nasional (*Stade des Martyrs de la Pentecôte*) di Kinshasa, kota dengan patung emas raksasa Laurent-Désiré Kabila yang gemuk dan mirip Mao, terkadang tampak lebih mirip kota di Sungai Yangtze daripada di Kongo (tiruan bendera nasional Tiongkok oleh DRC/Republik Demokratik Kongo sebelum mengganti bendera tahun ini terlalu mencolok untuk diabaikan).

KAPITALISME NEGARA

Tidak seperti Uni Soviet, Tiongkok berhasil melakukan transisi dari "kapitalisme negara" yang tertutup (era-Maois) menuju model neoliberal berorientasi ekspor. Pertumbuhan ekonominya yang pesat dan barang-barang murahnya (diawasi oleh *CPP/Partai Komunis Tiongkok*) dapat membuat negara itu melampaui AS sebagai kekuatan manufaktur terbesar di dunia pada 2010.

Ledakan kapitalis ini dibangun di atas penindasan brutal terhadap kelas pekerja dan kaum petani. Mogok kerja adalah ilegal, para pembangkang dibunuh, dan 20% rumah tangga kaya memperoleh 42% pendapatan perkotaan, sementara 20% termiskin hanya menerima 6%. Intensitas perjuangan kelas meningkat tajam: mogok kerja melonjak dari 8.150 pada 1992 menjadi 120.000 pada 1999. Tahun lalu, penduduk desa Huaxi di provinsi Zhejiang, bertempur dengan tangan kosong melawan polisi dan pejabat lokal, dan berhasil mengusir mereka. Pada Desember, ratusan warga desa bersenjatakan dinamit dan bom molotov menyerang polisi di Dongzhou, provinsi Guangdong, setelah polisi membunuh 20 warga yang memprotes perampasan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik. Sebuah sumber yang dekat dengan komite sentral *CPP* mengungkap bahwa sekitar 3 juta pekerja ikut serta dalam protes tahun lalu.

Ini adalah negara dengan upah minimum resmi hanya US$63 per-bulan (bandingkan dengan Vietnam yang baru memenangkan kenaikan upah melalui mogok liar melawan “bos-bos komunis” mereka), memiliki catatan kematian tambang terburuk di dunia (kantor berita resmi *Xinhua* mencatat 5.986 kematian hanya di tambang batu bara pada 2005, yang dalam beberapa kasus memicu para penambang menyerang majikannya dengan dinamit), dan menjadi wilayah operasi perusahaan-perusahaan multinasional seperti *Nike* dan *McDonald's* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Ketika teror dan represi menggerakkan ekonomi Tiongkok, kelas kapitalisnya melihat ke luar negeri untuk mencari tenaga kerja murah, bahan mentah, dan pasokan energi. Afrika yang secara ekonomi tersisih akibat krisis sejak 1970-an tiba-tiba menjadi properti panas. Pada 2005 ekonomi Afrika tumbuh 5% (tercepat dalam beberapa dekade), karena meningkatnya permintaan bahan mentah dengan permintaan Tiongkok memainkan peran kunci.

Pada 1980-an dan 1990-an, Afrika nyaris hilang dari peta investasi karena hanya menerima kurang dari 1% dari seluruh investasi langsung swasta ke negara-negara “dunia ketiga” pada 1995. Kapitalis Tiongkok (dan Afrika Selatan) kini mengisi celah tersebut dan trennya terus meningkat.

TIONGKOK DI AFRIKA

Cari Yang Anda Mau...

Telusuri

Mengenai Saya

Front Anti-Penindasan Sidoarjo

Lihat profil lengkapku

Arsip Blog

▼ 2026 (85)
- ► Agustus (1)
- ► Juli (9)
- ► Juni (10)
- ► Mei (14)
- ► April (22)
- ► Maret (24)
- ▼ Januari (5)
  - Mengapa Kami menjadi Anarkis di Sudan?
  - Darah, Air dan Minyak—Kekeliruan Tentang Perang Da...
  - Sudan: Di Balik Pembantaian Khartoum—Latar Belakan...
  - Apakah Tiongkok Adalah Kekuatan Imperialis Baru di...
  - Somalia, Kenya, dan Ketidakstabilan Beberapa Negar...

► 2025 (8)

Translate

Pilih Bahasa

Diberdayakan oleh Google Terjemahan

Tiongkok diam-diam berdagang dengan Afrika Selatan di era apartheid, meskipun mereka mendanai gerakan pembebasan di negara tersebut dan negara tetangganya, seperti Zimbabwe. Hubungan resmi dengan Afrika Selatan dipulihkan pada 1998.

Menurut Martin Davies, direktur *Centre for Chinese Studies* di Universitas Stellenbosch (dan pengusaha dengan kepentingan bisnis di Shanghai), tahun lalu perdagangan antara Tiongkok dan Afrika melonjak menjadi US$35 miliar, dengan investasi Tiongkok terutama di sektor minyak, khususnya di Nigeria, Angola, Sudan, dan Guinea Khatulistiwa.

Kondisi suram di negara-negara tersebut hampir tidak menjadi penghalang bagi Tiongkok: entah itu masalah minimnya demokrasi di Guinea Khatulistiwa, perang saudara di Sudan, maupun kenyataan bahwa pencurian terang-terangan kekayaan minyak di Angola dan Nigeria oleh klik penguasa lokal telah memicu konflik; dalam konflik tersebut, *UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola)* dan *MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta)* masing-masing berupaya memperebutkan bagiannya.

Jadi, tidak mengherankan jika menurut para aktivis HAM setempat helikopter tempur Tiongkok digunakan dalam pembantaian terhadap warga sipil di Darfur. Tiongkok yang memiliki pos penyadapan elektronik di Komoro, memberikan dukungan militer besar-besaran kepada Sudan antara 1996–2003, termasuk pesawat jet tempur. Negara itu juga mengirimkan berton-ton senjata ke Ethiopia dan Eritrea sebelum pecahnya perang perbatasan tahun 1998, serta menjual jet tempur, pesawat militer, dan peralatan pengacau radio (yang digunakan untuk mencegah siaran luar negeri masuk) kepada rezim di Zimbabwe.

AFRIKA SELATAN

Tiongkok telah melumasi roda imperialismenya di Afrika dengan menghapus utang lebih dari US$1 miliar yang dipinjamkan kepada 32 negara Afrika, dan *SABC (South African Broadcasting Corporation)* melaporkan bahwa neraca perdagangan Afrika Selatan dengan Tiongkok tumbuh 26% setiap tahunnya.

Afrika Selatan adalah mitra dagang terbesar Tiongkok di Afrika, dengan perdagangan meningkat 400% selama enam tahun terakhir. Afrika Selatan memasok bijih besi dan bahan mentah lainnya, menerima barang-barang manufaktur, dan sebuah perjanjian dagang baru akan membuat Tiongkok membatasi ekspor tekstil, namun memperkuat kerja sama di bidang energi nuklir. Sementara itu, perdagangan Afrika Selatan dengan mitra tradisional seperti Inggris terus menyusut.

Namun, pentingnya hubungan dengan Tiongkok relatif terbatas, mengingat kekuatan dan keragaman kapitalisme Afrika Selatan. Di sisi lain, investasi Tiongkok sangat besar pengaruhnya pada negara dengan ekonomi lemah seperti Guinea Khatulistiwa. Kepentingan Tiongkok dalam mengamankan pasokan bahan baku langsung, misalnya minyak di luar kartel *OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)*, membuat kita dapat memperkirakan hubungan ini akan semakin intensif, dan para elit Afrika akan memperkuat hubungan mereka dengan kekuatan Asia Timur tersebut. Afrika kini menyediakan sekitar 30% dari impor minyak Tiongkok.

SOLIDARITAS ATAU XENOFOBIA

Lalu, apa arti semua investasi dalam negeri ini: senjata, bijih dan minyak? *COSATU (Kongres Serikat Buruh Afrika Selatan)* menanggapi dengan rasa khawatir terhadap kesepakatan antara pemerintah Afrika Selatan dan Tiongkok, memperingatkan bahwa dengan banjirnya pakaian murah impor dari Tiongkok (peningkatan 480% sejak 2003), industri tekstil domestik yang sudah rapuh (62.000 lapangan pekerjaan hilang pada periode yang sama) akan runtuh.

Para pemimpin *COSATU* dipermalukan tahun lalu ketika anggota Serikat Pekerja Pakaian dan Tekstil Afrika Selatan yang berafiliasi dengan mereka berdemonstrasi karena baju merah kongres organisasi tersebut ternyata dibuat di Tiongkok. Banyak perusahaan tekstil dalam negeri Tiongkok di telah pindah ke Afrika untuk menghindari kuota impor Eropa dan Amerika, tetapi mereka sering membawa kondisi kerja yang brutal. Pada saat yang sama, *COSATU* dan *SACP (Partai Komunis Afrika Selatan)* sekutunya, terus memuji Tiongkok sebagai negara sosialis.

Kedua posisi tersebut salah. Kampanye *COSATU*: *"Belilah Produk Afrika Selatan"*, tidak akan menghentikan barang impor murah dari Tiongkok. Kampanye itu justru mempromosikan rasisme anti-Tiongkok dan menyuburkan xenofobia beracun yang menjangkiti kelas pekerja lokal. Kampanye itu juga menyiratkan bahwa semua rakyat Afrika Selatan (kapitalis dan kaum pekerja) memiliki kepentingan yang sama. Pandangan ini sangatlah keliru: kapitalis Afrika Selatan bukanlah sekutu kelas pekerja Afrika Selatan.

Selain itu, kebijakan *ANC's GEAR* mendorong perdagangan bebas, jadi tidak ada prospek bahwa gelombang impor akan berkurang secara signifikan. *COSATU* hanya melakukan seruan sia-sia terhadap moral dan patriotisme kelas penguasa Afrika Selatan, seruan yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Para kapitalis Afrika Selatan justru sedang membangun pakta dengan kapitalis Tiongkok. Jika para pesaing ini bisa bersatu, mengapa kelas pekerja tidak bisa belajar dari hal itu dan bersolidaritas dengan kelas pekerja Tiongkok?

INTI PERUSAHAAN

Seperti yang telah kami catat sebelumnya, baik GEAR maupun NEPAD bertujuan menarik lebih banyak perdagangan dan investasi asing, dan Tiongkok memenuhi kedua kriteria tersebut. Sementara itu, Menteri Intelijen (dan anggota politbiro *Liga Komunis Muda* yang menua), Ronnie Kasrils, memuji perkembangan pesat pembangunan di Tiongkok, termasuk proyek kontroversial Tiga Bendungan di Sungai Yangtze yang akan menggusur 1 juta penduduk sebagai *"impian semua insinyur konstruksi"*, dalam sebuah buku mengkilap berjudul, *China Through the Third Eye: South African Perspectives*, yang pembuatan dan penulisannya didanai oleh Kamar Dagang dan Industri Tiongkok di Afrika Selatan (*SACETA* atau *South Africa-China Economic and Trade Association*). Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang positif: *"Jika Tiongkok ingin tetap menjadi negara dengan ekonomi yang berkelanjutan, ia harus mempercepat transisi dari masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri."*

Kepala humas negara, Joel Netshitenzhe, mengklaim dalam buku yang sama bahwa: *"Afrika Selatan dan Tiongkok memiliki tujuan bersama karena kedua negara berkomitmen untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya. Keduanya memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan."* Mengingat kemiskinan struktural yang dipaksakan negara Tiongkok terhadap rakyatnya, sulit membayangkan apa yang ia maksud ketika ia memuji peran mesin propaganda negara Tiongkok atas *"ketelitian dan fokus Tiongkok dalam menggunakan informasi untuk memobilisasi rakyat di sekitar tujuan dan visi bersama.."*

Rasa dingin merayap di tulang ketika seseorang membaca pujiannya terhadap "keberagaman suara" dalam media Tiongkok, sambil mengabaikan sensor negara dan keterlibatan mesin pencari Barat seperti *Yahoo* yang membantu Tiongkok memenjarakan para pembangkang politik.

Pandangan wakil sekretaris jenderal *SACP* dan pemikir tunggal, Jeremy Cronin, bahkan lebih terbuka. *SACP* yang khawatir bahwa gelembung "sosialisme sejati yang(dianggap) ada" terkikis seiring dengan restrukturisasi perusahaan milik negara (*SOE* atau *State Owned Enterprise*—国有企业, *guóyǒu qǐyè*) di Tiongkok, mengirim delegasi ke sana pada 2001 untuk menyelidiki.

Cronin dan delegasinya jelas terkesan oleh tuan rumah mereka dari *CPP,* dia mengutip sebuah dokumen komite sentral 1999 yang menyatakan bahwa: *"Ekonomi kepemilikan publik (termasuk ekonomi milik negara) adalah dasar ekonomi dari sistem sosialis Tiongkok.. Tiongkok harus selalu mengandalkan dan memainkan peran penting SOE untuk mengembangkan kekuatan produktif masyarakat sosialis dan mewujudkan industrialisasi serta modernisasi negara.."* Jadi, Tiongkok tampaknya sosialis sekaligus kapitalis! Apa yang harus kita pahami dari pemikiran yang begitu membingungkan seperti itu?

"Untuk mengelola SOE dengan baik secara umum, usaha harus dilakukan untuk membangun sistem kepemimpinan, organisasi, dan manajerial yang sesuai dengan hukum ekonomi pasar dan kondisi nyata di Tiongkok, memperkuat kepemimpinan, memberi ruang bagi organisasi partai sebagai inti politik perusahaan, dan berpegang pada prinsip bergantung sepenuhnya pada kelas pekerja.." Dan "bergantung" itulah yang mereka lakukan, karena keajaiban Tiongkok dibangun "sepenuhnya" di atas eksploitasi dan teror!

PERGANTIAN PENGUASA?

Jadi, komunisme Tiongkok akhirnya tersingkap tak lebih dari sekadar program modernisasi yang dipandu oleh para pakar pemasaran dan manajemen otoriter yang merangkap sebagai bos Partai! Dan Partai itu sendiri tampak sebagai klik para komisaris yang hidup di atas punggung (menunggangi) kelas pekerja!

Cronin mengakui bahwa delegasinya *"tidak memiliki cukup waktu untuk menilai sejauh mana"* komitmen komite sentral terhadap *"pengambilan keputusan demokratis"* dan *"status kelas pekerja sebagai tuan atas perusahaan mereka sendiri* (perusahaan-perusahaan kapitalis yang diarahkan oleh Partai)", namun ia menganggap penting bahwa kata-kata hampa semacam itu paling tidak telah dituliskan di atas kertas.

Cronin memuji rezim tersebut karena *"agenda sosialis yang cukup jelas (yang) bersinar terang.." "Tidak ada alasan"*, keluhnya, *"mengapa pasar tidak boleh ada dalam sosialisme"*, suatu penafsiran liberal yang memungkinkan keberadaan sektor jasa kecil dan menengah muncul dan dimiliki secara pribadi. Tidak jelas di mana tepatnya *"sosialis.."* dan *"bersinar terang.."* itu berada.

Dari pemikiran ekonomi yang campur-aduk itulah muncul politik yang membingungkan, yang didasarkan pada kebutuhan industri dan pasar, bukan kebutuhan rakyat. Sedangkan menurut pandangan Cronin: *"Kenaikan upah di sektor publik yang diberlakukan semata-mata untuk merangsang permintaan pasar",* disebutnya sebagai "sosialis"?

Jadi, yang kita lihat adalah pemerintah *ANC/SACP* yang tidak hanya semakin giat berdagang, tetapi juga secara ideologis semakin condong dengan negara totaliter besar terakhir di dunia, sebuah negara yang secara terang-terangan kapitalis sekaligus anti-buruh dengan sedemikian rupa, sehingga keterampilan Cronin sebagai penyair pun gagal menutupi kenyataan brutal tersebut. Pemikiran "kapitalisme negara" *SACP* akhirnya menemukan perkawinan yang cocok dengan neoliberalisme dalam contoh Tiongkok.

PROTEKSIONISME ATAU PERJUANGAN KELAS

Barang-barang Tiongkok murah karena tenaga kerja Tiongkok murah. Jika *COSATU* ingin melindungi pekerja lokal dan menunjukkan komitmennya pada perjuangan kelas pekerja internasional, mereka seharusnya mendukung pengorganisasian serikat buruh di Tiongkok, serta meningkatkan perjuangan kelas di dalam negeri dan di Afrika bagian selatan. Kapitalisme neoliberal hidup dengan cara mengadu domba tenaga kerja murah di satu negara dengan tenaga kerja yang lebih murah di negara lain, dalam perlombaan menuju titik terendah. Satu-satunya jalan keluar adalah solidaritas internasional dan perjuangan kelas, dimulai dengan perjuangan untuk upah minimum internasional dan hak serikat buruh universal.

Tiongkok memiliki tradisi panjang perjuangan kelas, dan ini bukan tentang *CPP* atau Mao! Pada tahun 1913, para anarko-sindikalis membangun serikat buruh pertama di Kanton, menantang serikat reformis dan komunis di semua pusat industri besar seperti Shanghai pada 1920-an. Gerakan petani bersenjata anarkis menguasai wilayah luas di provinsi Fukien, Kirin, dan Manchuria pada 1930-an, dan gerilyawan anarkis bertempur bersama kaum komunis dalam perlawanan terhadap imperialisme Jepang pada 1940-an.

Namun, setelah kudeta Maois pada 1949, sekitar 10.000 militan serikat anarkis dipaksa bergerak di bawah tanah, dan gerilyawan ala Makhnovis seperti Chu Cha Pei dipaksa mundur ke pegunungan di provinsi Yunnan, dimana mereka terus mengganggu kelas penguasa baru yang dipimpin Mao beserta kelompok warlord dan kapitalisme negaranya.

Ketika Afrika semakin menjadi halaman belakang imperialisme Tiongkok yang didorong kepentingan akan minyak, kita harus bertanya terlebih dahulu apakah pemerintah di sini akan mencoba meniru aspek-aspek terburuk dari perdamaian sipil yang dipaksakan ala Tiongkok? Perkembangan yang akan menjadi ancaman serius bagi kelas pekerja kita sendiri.

ANARKISME ATAU MARXISME?

Kita tidak tertarik mengikuti kaum kiri yang mengharapkan berakhirnya “restorasi kapitalis” di Tiongkok, karena Tiongkok sudah kapitalis sejak era Mao berkuasa, dan gerakan revolusioner Tiongkok mana pun harus membuang Marxisme beserta segala variannya, termasuk Maoisme. Kita juga tidak dapat menerima klaim bahwa Tiongkok adalah “sosialis”, terlepas dari apa yang dipikirkan oleh para pemimpin *SACP*.

Kapitalisme adalah sistem kelas, dan sistem kelas berarti perjuangan kelas. Cepat atau lambat, kelas pekerja Tiongkok akan menemukan kembali tradisi perjuangannya yang membanggakan dan menentukan nasibnya sendiri, mengenyahkan para pemimpin Partai dan kapitalis yang parasitis, serta membangun apa yang dalam bahasa Mandarin disebut *“wuzhengfu gongchan”* atau produksi bersama tanpa pemerintah, dengan kata lain: anarkis-komunisme, dan mengubur *CPP*.

Namun sampai hari itu tiba, ada pertanyaan yang lebih serius yang harus kita ajukan dengan implikasi jauh melampaui perbatasan kita: akankah Tiongkok menggantikan Inggris sebagai kekuatan imperialis baru di Afrika Selatan? Dengan kata lain, apakah akan terjadi pergantian penguasa yang pada akhirnya mendorong Afrika Selatan melakukan ekspedisi militer di Afrika demi melindungi kepentingan kapitalis Tiongkok? Semua anti-imperialis yang serius harus mempertimbangkan dan merencanakan kemungkinan Afrika menjadi medan pertempuran masa depan antara kepentingan ekspansionis Barat yang didukung AS dan Tiongkok, serta menyatukan rakyat benua ini dalam perjuangan melawan para baron minyak.

Diterjemahkan dari: https://theanarchistlibrary.org/library/lucien-van-der-walt-and-michael-schmidt-is-china-africa-s-new-imperialist-power

Diposting oleh Front Anti-Penindasan Sidoarjo

Posting Lebih Baru Beranda Posting Lama

Tema PT Keren Sekali. Diberdayakan oleh Blogger.